



Otorisasi Pengelola/Penulis Situs Kesehatan dan Kedokteran di Internet

Dani Iswara

Mahasiswa Program Pascasarjana Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
Field Epidemiology Training Program (FETP)

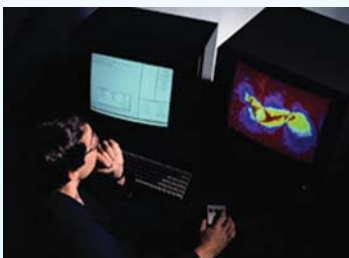
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Makin maraknya situs web dan blog kesehatan-kedokteran di Internet seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memang dapat menguntungkan, di sisi lain justru dapat membingungkan penggunanya. Verifikasi terhadap informasi kesehatan dan kedokteran yang disajikan via Internet sangat dibutuhkan. Di era banjir informasi yang sering disebut Web 2.0, Health 2.0, Medicine 2.0, Research 2.0, dan sejenisnya, pengguna dapat sekaligus bertindak sebagai penyedia konten/informasi (*user generated content*).

Bagaimana menentukan informasi kesehatan dan kedokteran di Internet yang berkualitas?

Salah satu acuan yang masih digunakan adalah *Health on the Net Code of Conduct* (HONcode*). Acuan ini dikelola oleh Yayasan HON (Health on the Net), organisasi non profit dan non pemerintah yang diakui oleh *Economic and Social Council of the United Nations* (ECOSOC). Mereka berusaha mewujudkan informasi kesehatan dan kedokteran yang berkualitas di Internet.

Konsep yang ditawarkan:



1. *Authoritative*
2. *Complementary*
3. *Privacy*
4. *Attribution*
5. *Justifiability*
6. *Transparency*
7. *Financial disclosure*
8. *Advertising policy*

Beberapa organisasi dan panduan lainnya tersedia di Internet. Salah satu hal yang mendasar dari beberapa konsep tersebut, adalah tentang otorisasi; yaitu seputar kewenangan dan kualifikasi pengelola, penulis, atau penyaji informasi.

Otoritas penyaji informasi

Anjuran kesehatan dan kedokteran yang dimuat di Internet semestinya terkait dengan kapasitas penyaji; apakah diberikan oleh orang medis atau non medis mengingat penyaji informasi kesehatan dan kedokteran tidaklah harus orang medis. Identitas penyaji hendaknya mudah ditemukan di halaman *About, About us, About author, "Tentang", "Penulis",* dan sejenisnya.

Informasi tentang penyaji informasi yang mungkin perlu ditampilkan di antaranya:

- Nama pengelola, editor, dan moderator, boleh memakai nama alias (*pseudonym*)
- Organisasi pengelola/terkait
- Profesional medis atau bukan
- Penjelasan singkatan/akronim gelar akademis pengelola (misal gelar spesialis tertentu), dll.

Di tengah maraknya pemanfaatan media blog sebagai ajang diskusi dan konsultasi kesehatan-kedokteran, HONcode menambahkan syarat berikut:

- semua pengguna diasumsikan bukan profesional medis, kecuali menyatakan diri berbeda,
- jika menyampaikan informasi medis layaknya dokter, sebaiknya mengidentifikasi diri dengan jujur.

Verifikasi otorisasi versi Indonesia

Sepengetahuan penulis, belum ada sistem otorisasi sejenis HONcode di Indonesia. HONcode saat ini belum mengakomodasi bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu sudah ada dalam daftar mereka. Walau tanpa label HONcode, prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan konten lokal. Menurut penulis, HONcode pun tidak dapat menentukan kebenaran identitas penyaji informasi. Apakah situs web/blog yang diakreditasi oleh HONcode memang benar disajikan oleh dokter, spesialis, dokter gigi, perawat, atau pasien?

Lepas dari HONcode, penulis berpendapat otorisasi versi Indonesia bisa saja dikaitkan dengan registrasi dokter yang dikelola Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Misalnya, pada suatu halaman web yang memuat otorisasi, terdapat pranala (*taut; link; hyperlink*) yang menuju ke halaman web di situs idionline.org. Minimal, memanfaatkan hasil pencarian nama penulis di situs idionline.org.

Keuntungannya, selain memudahkan verifikasi, jejaring ini dapat digunakan untuk mendata jumlah dokter yang mengelola informasi kesehatan-kedokteran di Internet. Kerugiannya, identifikasi hanya dapat digunakan bagi dokter. Bagaimana dengan mahasiswa kedokteran? *) HONcode (<http://www.hon.ch>)